

INOVASI PROGRAM PENYALURAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH MELALUI KARTU JOGJA BERPRESTASI

INNOVATION OF REGIONAL EDUCATION GUARANTEE PROGRAM THROUGH KARTU JOGJA BERPRESTASI

Oleh: Ayusti Nur Utami, Universitas Negeri Yogyakarta
ayusti3024fip.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi program penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui Kartu Jogja Berprestasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya kepala UPT, kepala sub bagian UPT, pengelola JPD di sekolah, dan siswa penerima JPD. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap inisiasi inovasi KJB diawali dengan fase *agenda setting* dan fase penyesuaian. Tahap implementasi inovasi KJB melalui tahap re-definisi, tahap klarifikasi dan tahap rutinisasi. Faktor pendukung yaitu kerjasama, tersedianya Sistem Informasi Manajemen Jaminan Pendidikan Daerah, dukungan dari lintas sektor Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Faktor penghambat yaitu penerima JPD kurang memiliki keterampilan literasi teknologi informasi, keterbatasan sosialisasi secara daring, pembatasan barang yang bisa dibeli dengan KJB, masyarakat lebih senang terima uang tunai dari pada kartu belanja, dan kurangnya toko mitra.

Kata kunci: inovasi, Jaminan Pendidikan Daerah, Kartu Jogja Berprestasi

Abstract

The purpose of this study is to describe the innovation of the Regional Education Guarantee distribution program through Kartu Jogja Berprestasi with a descriptive qualitative approach. The research subjects were the head of the Regional Education Guarantee Center, the head of the sub-section of the Regional Education Guarantee Center, the manager of the Regional Education Guarantee at the school, and the students who received the Regional Education Guarantee. Data collection techniques used documentation studies, interviews, and observation. Analysis of the data used the interactive model of Miles and Huberman. The validity of the data used triangulation techniques and sources. The results of the study indicate that the initiation stage of KJB innovation began with the agenda setting phase and the matching phase. The KJB innovation implementation stage goes through the re-definition phase, the clarification phase and the routinization phase. Supporting factors are cooperation, availability of Regional Education Guarantee Management Information System, support from cross-sectoral Yogyakarta City Government Organizations, infrastructure, and human resources. The inhibiting factors are that the target community of Regional Education Guarantee recipients lacks information technology literacy skills, online socialization, restrictions on goods that can be purchased with KJB, people prefer to accept cash rather than shopping cards, and lack of partner stores.

Keywords: innovation, Jaminan Pendidikan Daerah, Kartu Jogja Berprestasi

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar adalah hak dan kewajiban setiap warga negara yang merupakan pendidikan sembilan tahun yang terdiri dari program pendidikan sekolah dasar selama enam tahun dan program pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama selama tiga tahun. Program tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 yaitu tiap warga negara Indonesia berhak atas pengajaran dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dan UUD 1945 pasal 6 ayat 1 yaitu setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Kewajiban mengikuti pendidikan dasar juga tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 1 yaitu setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Karena setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan dasar, pemerintah harus memastikan pengimplementasian pendidikan wajib memiliki standar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dalam rangka pemerataan akses dan kesempatan pendidikan pemerintah mengeluarkan program wajib belajar. Dalam UU No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 dijelaskan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen untuk menyediakan pendidikan yang memadai

dari jenjang TK hingga perguruan tinggi adalah Kota Yogyakarta. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan wajib belajar 12 tahun. Setiap anak berusia sekolah di Kota Yogyakarta didorong untuk mendapatkan akses pendidikan minimal di jenjang SMA sederajat. Namun wajib belajar 12 tahun menghadapi kendala adanya kasus putus sekolah. Faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah atau berisiko putus sekolah diantaranya terdapat siswa yang berasal dari keluarga yang secara finansial kurang mampu sehingga tidak dapat membiayai pendidikan anaknya, siswa yang terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, dan siswa yang memang tidak ingin pergi ke sekolah. (Sa'diyah: 2020). Meskipun sudah ada kebijakan atau program berupa bantuan pembiayaan pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk menangani kasus putus sekolah yang disebabkan faktor ekonomi. Permasalahan tersebut merupakan salah satu permasalahan yang selalu ada sepanjang waktu. Hal itu mendorong dilakukannya perubahan baru melalui inovasi.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. (Peraturan Menteri PANRB

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik). Guna mencapai hasil yang baik dalam kuantitas maupun kualitas pelayanan, maka dibutuhkan inovasi untuk menciptakan hal yang baru atau mengembangkan yang telah ada. Jika sebuah organisasi mengalami perubahan oleh suatu hal yang baru dikenalkan maka hal itu dapat disebut sebuah inovasi. Inovasi di dalam sebuah organisasi seringkali dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang menyebar ke setiap aspek kehidupan (manusia), kebutuhan dalam menghadapi tantangan dari pesaing, dan perubahan yang terjadi di luar organisasi. (Prawiro: 2018). Rogers (1983: 211) menyatakan sebuah inovasi perlu ditemukan kriteria sebagai berikut yang memberikan keuntungan (*relative advantage*), kepuasan atas suatu kebutuhan atau penyelesaian masalah (*compatibility*), penggunaannya tidak rumit (*complexity*), pengalaman dalam mencoba dalam hal ini baik inovasi itu sendiri maupun penggunaannya (*trialability*), dan kemudahan untuk diamati cara penggunaan dan hasil dari inovasi tersebut (*observability*).

Suwarno (2008: 32) menyatakan inovasi di sektor publik merupakan sebuah terobosan untuk mengatasi permasalahan di sektor publik. Penerimaan budaya inovasi mengurai kekakuan sektor publik secara formal. Inovasi secara normal dapat ditemukan di sektor bisnis kini mulai diterapkan ke dalam sektor publik. Budaya inovasi harus lebih baik dalam pembentukannya dan pengembangannya.

Di sektor pemerintahan, inovasi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pelayanan publik. Pemerintah mengarahkan setiap daerah di Indonesia mengembangkan inovasi karena inovasi

termasuk kunci daya saing daerah. Guna perbaikan kualitas pelayanan publik, pemerintah secara berkelanjutan mendukung inovasi daerah dengan menyiapkan sebuah program. Terkait dengan inovasi, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui UPT P-JPD juga berupaya menghadirkan pelayanan yang berkualitas dengan melahirkan sebuah program inovasi yang dapat menyentuh langsung pada masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta memperkenalkan program atau inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan salah satunya yaitu Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). JPD merupakan salah satu program bantuan pendidikan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta khusus bagi peserta didik yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS). Program ini menyediakan siswa dari keluarga miskin dengan pendidikan yang berkualitas baik swasta maupun negeri di jenjang TK sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat.

Tujuan dari diluncurkannya JPD untuk memastikan bahwa anak berusia sekolah dari keluarga pemegang KMS tidak terpaksa putus sekolah karena alasan biaya. Kemunculan JPD adalah sebuah manifestasi komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun sejak tahun 2007. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan program ini dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Kemudian pada tahun 2020 UPT P-JPD, dalam kolaborasinya dengan BPD DIY meluncurkan inovasi program Kartu Jogja Berprestasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. KJB adalah sebuah kartu yang digunakan sebagai alat untuk menyalurkan JPD. Bantuan tersebut akan dikirimkan ke rekening KJB untuk membeli perlengkapan sekolah di toko mitra yang terpilih untuk melayani pembayaran dengan menggunakan KJB. Penerima JPD akan diberikan KJB sebagai kartu pembayaran transaksi non tunai. Bagi siswa sekolah negeri, KJB bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah pribadi siswa termasuk pembelian alat tulis, buku, dan seragam ke *merchant* atau toko mitra yang telah ditunjuk BPD DIY. Sedangkan bantuan bagi siswa sekolah swasta memiliki jumlah nominal yang lebih banyak sehingga dapat dibelanjakan untuk kebutuhan personal maupun operasional sekolah. Dengan diluncurkannya KJB, ini merupakan pertama kali penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan disalurkan melalui kartu non tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian di Indonesia yang menggunakan dasar teori proses inovasi dalam organisasi dan Kartu Jogja Berprestasi di Kota Yogyakarta belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, penyediaan akses pendidikan yang berkualitas menjadi urgensi yang mutlak dalam penelitian proses inovasi dalam organisasi, dalam hal ini di organisasi pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sebaiknya serius memperhatikan inovasi daerah untuk memperbaiki kekurangan dalam organisasi. Selain itu, pemerintah daerah sebagai organisasi membutuhkan akselerasi dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik sehingga inovasi merupakan solusi

untuk permasalahan ini. Dalam hal ini, Kota Yogyakarta telah mempertahankan predikat kota pelajar dengan kebijakan yang mendukung untuk membantu siswa miskin mengenyam pendidikan yang lebih layak sehingga akses terhadap pendidikan lebih merata.

Salah satu kebijakan tersebut adalah Kartu Jogja Berprestasi yang dimaksud untuk menyediakan bantuan pendidikan dalam bentuk inovasi kartu belanja non tunai. Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa mendeskripsikan inovasi program penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah melalui Kartu Jogja Berprestasi. Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Inovasi Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah Melalui Kartu Jogja Berprestasi”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses inovasi penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah melalui Kartu Jogja Berprestasi. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kegiatan atau fakta yang berkaitan dengan JPD pada saat penelitian dilaksanakan dengan mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya terjadi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPT P-JPD pada bulan Februari – Mei 2022. Selain di UPT P-JPD, penelitian ini juga berlangsung di SMP Negeri 15 Yogyakarta, SMK Negeri 5 Yogyakarta, dan MTs Muhammadiyah Karangajen yang memiliki siswa penerima Jaminan

Pendidikan Daerah. Pemilihan sekolah yang menjadi lokasi peneliti didasarkan pada sekolah dengan jumlah penerima bantuan JPD lebih banyak di antara sekolah lain yang ada di Kota Yogyakarta. Selain itu, banyak siswa di sekolah-sekolah tersebut datang dari lingkungan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi dari miskin hingga menengah kebawah.

Target/Subjek Penelitian

Pemilihan sumber data untuk penelitian ini ditentukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan yang spesifik dari tujuan penelitian. (Sugiyono, 2015: 215). Subjek dalam penelitian ini adalah Mantan Kepala Tata Usaha UPT P-JPD, Kepala UPT P-JPD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT P-JPD, pengelola JPD di SMK Negeri 5 Yogyakarta, pengelola JPD di SMP Negeri 15 Yogyakarta, pengelola JPD di MTs Muhammadiyah Karangkalen Yogyakarta dan siswa penerima bantuan JPD.

Prosedur

Prosedur yang dilakukan oleh peneliti di antaranya: 1) kajian pustaka dan pra observasi. Peneliti melakukan kajian pustaka mengenai *need assessment*, proses inovasi pendidikan, proses inovasi dalam organisasi, kemiskinan, dan penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah melalui Kartu Jogja Berprestasi. Pra observasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan sesuai dengan fokus penelitian; 2) instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi sebagai pedoman untuk pengumpulan data di lapangan; 3) pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan sembilan informan, observasi, dan studi dokumentasi di UPT P-

JPD untuk menemukan informasi mengenai proses inovasi penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah; 4) analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan ke dalam pengolahan data yang telah diperoleh. (Sugiyono, 2018: 42); 5) keabsahan data. Keabsahan data dilakukan dengan melakukan analisis data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel melalui triangulasi teknik dan sumber; 6) pemecahan masalah diperoleh peneliti berdasarkan hasil penelitian, meliputi saran yang ditujukan kepada *stakeholder* terkait; dan 7) laporan penelitian. Peneliti menyajikan laporan mengenai temuan hasil penelitian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018: 224) menjelaskan bahwa teknik dalam mengumpulkan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti dapat dengan mudah menggali data menggunakan instrumen pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data. Sugiyono (2018: 305) berpendapat instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan peneliti itu sendiri, namun sebuah instrumen penelitian secara sederhana dapat terus dikembangkan seiring dengan fokus penelitian yang semakin jelas arahnya. Validasi yang dilakukan penelitian ini menggunakan panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Model analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan dalam menganalisis data penelitian ini. Miles dan Huberman

(Sugiyono, 2018: 246) menjelaskan model analisis interaktif merupakan kegiatan menganalisis data kualitatif yang meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion/verifying*) dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sampai data yang dihasilkan jenuh dan tuntas.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data terkait program JPD diperoleh dari dinas pendidikan dan sekolah sebagai permulaan dari proses analisis interaktif. Setelah pengumpulan data, maka akan dilakukan pemilahan data penting dan tidak penting untuk penelitian ini. Proses tersebut memasuki tahap reduksi data. Kemudian data yang dipilih disajikan dan penulis menarik kesimpulan. Jika data yang dimiliki tidak lengkap terkait JPD pada tahap reduksi dan penyajian data, maka akan kembali melakukan tahap pengumpulan data dan lakukan hal yang sama sampai data yang terkait dengan JPD valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Inovasi Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah Melalui Kartu Jogja Berprestasi

a. Tahap Inisiasi

1) Agenda Setting

Rogers (1983: 363) menjelaskan proses *agenda setting* merupakan proses mengadakan studi lingkungan untuk merumuskan inovasi yang dibutuhkan dan permasalahan umum dalam menentukan nilai potensi dari sebuah inovasi yang akan diadopsi dalam suatu organisasi. *Agenda setting* dimulai dengan pemeriksaan oleh BPK di UPT P-JPD disertai pemberian rekomendasi untuk memperbaiki

mekanisme penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah sehingga ditindaklanjuti oleh UPT P-JPD dengan mempelajari dan membuat konsep penyaluran bantuan pendidikan non tunai yaitu kartu belanja.

Berdasarkan teori Rogers, proses inisiasi Kartu Jogja Berprestasi sudah sesuai dengan tahapan yang dicantumkan oleh Rogers. Seperti pada tahapan agenda setting, Dindikpora telah merumuskan latar belakang masalah diadakannya inovasi ini yang didasari pada hasil pemeriksaan dari BPK. Penyebabnya yaitu terletak pada mekanisme penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pembelanjaan dana JPD sehingga ada kelebihan dana JPD yang mengendap di rekening sekolah yang belum dikembalikan ke kas daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk memperbaiki dan memodifikasi kembali mekanisme penyaluran JPD agar mencegah terjadinya kelebihan dana JPD di rekening sekolah dan bantuan tersebut dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan poin merumuskan permasalahan umum guna mengetahui kebutuhan inovasi. Setelah itu Dindikpora Kota Yogyakarta melakukan studi literatur terkait dengan konsep kartu bantuan pendidikan yang telah ada sebelumnya yaitu KJP dan kartu BPMKS. Hal ini sesuai dengan poin proses mengadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensi dari sebuah inovasi yang akan diadopsi dalam suatu organisasi.

2) Penyesuaian

Pada tahap penyesuaian, di poin penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi ini, Dindikpora telah melakukan penyesuaian berupa keputusan membuat kartu belanja berupa Kartu Jogja Berprestasi karena dianggap akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mekanisme penyaluran JPD. Setelah proses agenda setting maka dilanjutkan dengan proses penyesuaian yaitu melakukan studi banding ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk melihat secara langsung penyaluran bantuan pendidikan secara non tunai yang telah lebih dulu diimplementasi dalam memperkuat keputusan untuk mengadopsi kartu bantuan pendidikan non tunai ke dalam mekanisme penyaluran JPD.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada studi banding tersebut, UPT P-JPD memutuskan untuk mengadopsi bantuan pendidikan non tunai pada mekanisme penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah dengan beberapa rancangan yang disesuaikan dengan kondisi Dindikpora di Kota Yogyakarta. Dengan adanya keputusan ini maka dilanjutkan dengan memodifikasi Kartu Jogja Berprestasi sampai yang termasuk dalam proses implementasi di tahap re-definisi/re-strukturisasi. Hal ini sesuai dengan poin merencanakan dan membuat desain penerapan inovasi menurut teori Rogers.

b. Tahap Implementasi

1) Re-definisi

Dalam tahap ini, inovasi dimodifikasi dan dire-invensi didasarkan pada situasi dan permasalahan organisasi. Struktur organisasi dimodifikasi sesuai dengan inovasi yang akan diadopsi dalam

suatu organisasi. Pada tahap ini, UPT P-JPD hanya melakukan fase re-definisi terhadap Kartu Jogja Berprestasi tanpa perlu melakukan re-strukturisasi UPT P-JPD itu sendiri.

Tahap re-definisi/re-strukturisasi dilakukan dengan memodifikasi Kartu Jogja Berprestasi dari sebuah rancangan sehingga dapat digunakan siswa sebagai alat transaksi pembelanjaan non tunai di toko mitra yang bekerjasama dengan BPD. Modifikasi yang dilakukan oleh UPT P-JPD dengan membuat sistem verifikasi penerima JPD berupa SIM JPD dan regulasi barang yang dibeli dengan KJB. Barang yang bisa dibeli dengan menggunakan KJB berupa kebutuhan sekolah seperti sepatu, tas, seragam, alat tulis, buku, dan lain-lain. Lalu UPT P-JPD mempercayakan BPD untuk menentukan toko mitra yang bisa melayani pembayaran dengan menggunakan KJB sedangkan modifikasi secara struktural tidak banyak berubah dengan yang sebelumnya.

Setelah rancangan Kartu Jogja Berprestasi telah dimatangkan, Dindikpora mengenalkan Kartu Jogja Berprestasi ke masyarakat dan sekolah dengan melakukan sosialisasi secara daring kemudian siswa mendapatkan informasi melalui sekolah dan orang tua. Setelah sosialisasi dan semua penerima JPD telah diajukan, Kartu Jogja Berprestasi diluncurkan pada tanggal 17 Juni 2020. Dilihat menggunakan teori Rogers maka paparan di atas sudah sesuai dengan tahap re-definisi yang dimaksud Rogers karena inovasi dimodifikasi dan re-invensi disesuaikan dengan situasi dan masalah organisasi.

2) Klarifikasi

Dalam tahap klarifikasi, hubungan antara inovasi yang diadopsi dan organisasi

yang mengadopsi inovasi dirumuskan secara jelas sehingga inovasi dapat diimplementasikan sesuai dengan ekspektasi.

Proses klarifikasi Kartu Jogja Berprestasi ditandai dengan kebermanfaatan dan kerugian yang dialami baik dari pihak UPT P-JPD, pengelola JPD di sekolah, dan siswa penerima JPD. Kebermanfaatan bagi siswa yaitu dana JPD dapat membantu meningkatkan motivasi siswa untuk rajin belajar perlengkapan sekolah yang dibutuhkan, siswa yang putus sekolah berkurang sampai tahun ini, bantuan dana JPD dapat langsung diperoleh siswa tanpa harus melalui sekolah, dan siswa tidak terbebani dengan tanggungjawab untuk menghabiskan dana JPD dalam satu semester karena sisa dana JPD yang belum dipakai bisa dicairkan saat siswa lulus sekolah.

Kebermanfaatan bagi orang tua yaitu KJB meringankan pengeluaran orang tua siswa dalam membeli kebutuhan perlengkapan sekolah sehingga tidak perlu mengeluarkan uang tunai, keuangan orang tua tidak terbebani untuk membeli perlengkapan sekolah, orang tua tidak perlu membawa uang untuk belanja perlengkapan sekolah, dan KJB meminimalisir penyalahgunaan dana JPD karena orang tua hanya bisa beli perlengkapan sekolah saja.

Kebermanfaatan bagi sekolah yaitu beban kerja yang dilakukan pengelola JPD di sekolah lebih ringan dan mudah karena sekolah tidak perlu menyimpan dana JPD, menyalurkan uang bantuan JPD siswa, dan membuat laporan penggunaan JPD. Sedangkan kerugian yang ditemukan yaitu orang tua dan siswa merasa toko mitra yang tersedia terlalu jauh untuk memanfaatkan dana JPD disebabkan toko mitra yang

tersedia masih kurang dan belum merata, orang tua dan siswa terkendala beli perlengkapan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah karena regulasi barang yang bisa dibeli belum mencakup semua kebutuhan siswa seperti seragam, buku paket, dan kuota data internet dan bagi sekolah swasta kadang dana JPD tidak dapat mencukupi biaya sekolah karena dana JPD dibagi 60% untuk biaya sekolah dan 40% untuk kebutuhan sekolah siswa tidak seperti saat sebelum ada KJB yang dana JPD dipotong untuk biaya sekolah dan sisa dana JPD yang telah dipotong kemudian diberikan ke siswa.

Hal ini berdasarkan pada teori Rogers yang menyatakan bahwa karakteristik dari sebuah inovasi harus memiliki keunggulan yang terbaik dan tidak melanggar nilai yang telah ada sebelumnya.

Keunggulan KJB dibandingkan dengan penyaluran JPD secara tunai yakni bantuan JPD dapat langsung diperoleh siswa karena dana JPD dikirim ke rekening setiap siswa tanpa harus ditampung terlebih dahulu di rekening sekolah, transaksi belanja secara non tunai dengan KJB meminimalisir penyalahgunaan dana JPD karena orang tua hanya bisa beli perlengkapan sekolah saja, dan sekolah tidak lagi mengelola dana JPD siswa sehingga beban kerja yang dilakukan pengelola JPD di sekolah lebih ringan dan mudah.

Selain itu, berdasarkan teori Rogers, sebuah inovasi dapat diterima jika inovasi itu teruji dan terbukti memiliki kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan cara atau benda yang lama. Oleh sebab itu, kualitas dari suatu produk inovasi harus dapat diuji langsung oleh setiap pihak atau individu. Dalam hal ini KJB sejak

diluncurkan sampai sekarang telah memberikan lebih banyak kebermanfaatannya daripada kerugian yang ditimbulkan.

3) Rutinisasi

Pada tahap ini inovasi telah kehilangan sebagian identitasnya, dan menjadi bagian dari aktivitas harian organisasi secara berulang. Melihat uraian di atas, proses rutinisasi Kartu Jogja Berprestasi sudah berjalan sesuai dengan teori Rogers dimana Kartu Jogja Berprestasi sudah memasuki tahun ketiga. Selama ini penyaluran JPD melalui KJB dianggap berhasil dan memberikan kebermanfaatannya oleh sebagian pihak yang terlibat dalam penyaluran JPD baik dari pihak UPT P-JPD, pengelola JPD, sekolah, orang tua, dan siswa sasaran bantuan JPD. Keberhasilan tersebut membuka kemungkinan untuk keberlanjutan program tersebut sehingga pihak yang terlibat dalam penyaluran JPD mulai terbiasa dengan mekanisme penyaluran non tunai dengan KJB. Hal ini sesuai dengan tahapan rutinisasi inovasi yaitu inovasi telah kehilangan sebagian identitasnya, dan menjadi bagian dari aktivitas harian organisasi secara berulang.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah Melalui Kartu Jogja Berprestasi

a. Faktor Pendukung

Pertama, adanya kerjasama yang melibatkan *stakeholder* merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk menyediakan bantuan bagi siswa KMS. Pengadopsian KJB dibutuhkan kerjasama antara UPT P-JPD, BPD dan toko mitra agar dalam penyaluran JPD non tunai hasilnya optimal.

Kedua, tersedianya SIM JPD sehingga proses verifikasi calon penerima JPD lebih efektif dan efisien untuk mendukung menentukan jumlah penyaluran dana JPD secara tepat. Verifikasi dilakukan secara otomatis hanya dengan memasukkan NIK siswa yang mengajukan JPD. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan kriteria, data tersebut diterima, namun jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan kriteria, sistem tersebut menolak data secara langsung. Hal ini sangat mempermudah pengelola JPD di sekolah karena tidak perlu lagi melakukan verifikasi data secara manual sehingga lebih efisien dan terhindar dari kesalahan verifikasi.

Ketiga, ada dukungan dari lintas sektor Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta sangat tinggi terkait penyediaan dana dan input masukan, sarana dan prasarana di UPT P-JPD yang mencukupi. Dukungan dari pihak luar terutama dalam penganggaran dana sangat penting dalam kelancaran penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah.

Keempat, terdapat sarana dan prasarana yang sejauh ini mendukung implementasi kegiatan program penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah. Sarana dan prasarana di UPT P-JPD yang mencukupi menunjang dalam melakukan pekerjaan dalam penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah.

Kelima, komunikasi dan kerjasama antar pegawai UPT P-JPD sangat baik dalam melayani masyarakat dan melakukan pekerjaan mengelola JPD. Berdasarkan pengamatan peneliti, pegawai UPT P-JPD mendukung kebijakan implementasi dan berkomitmen tinggi untuk melaksanakan pekerjaan mereka, dengan demikian

implementasi program tersebut dapat berjalan secara optimal.

b. Faktor Penghambat

Tidak hanya faktor yang mendukung pengadopsian Kartu Jogja Berprestasi, namun juga ditemukan faktor penghambat pengadopsian Kartu Jogja Berprestasi. Secara ringkas, faktor penghambat pengadopsian Kartu Jogja Berprestasi ialah sebagai berikut:

Pertama, masyarakat sasaran penerima JPD kurang memiliki keterampilan literasi teknologi informasi. Kurangnya keterampilan seseorang dalam literasi teknologi informasi dapat menghambat untuk dapat memanfaatkan suatu inovasi yang masih baru.

Kedua, sosialisasi daring kurang efektif. Saat pandemi Covid-19, sosialisasi yang biasa dilakukan secara luring harus dihentikan dan sosialisasi dilakukan secara daring ditambah dengan masyarakat sasaran bantuan yang jarang memiliki ponsel pintar dan tidak memiliki kemampuan literasi teknologi informasi semakin menyusahkan mereka untuk memperoleh informasi sehingga sosialisasi dianggap belum efektif.

Ketiga, keterbatasan barang yang bisa dibeli dengan KJB. Tujuan pembatasan barang yang dapat dibeli dengan KJB yang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan JPD juga mengakibatkan siswa tidak mampu memenuhi semua perlengkapan sekolah yang dibutuhkan.

Keempat, masyarakat lebih suka terima uang tunai dari pada kartu belanja. Pembatasan pembelanjaan dengan KJB yang dialami oleh siswa membuat beberapa siswa merasa lebih suka menerima bantuan dalam bentuk uang tunai daripada kartu belanja.

Kelima, kurangnya toko mitra di Kota Yogyakarta. Selama dua tahun toko mitra yang dapat melayani pembayaran dengan KJB belum cukup untuk menjangkau banyak siswa terutama siswa yang berdomilisi di pinggir kota. Meskipun toko mitra yang bekerjasama dengan BPD masih terbatas namun BPD sebagai partner UPT P-JPD terus berusaha menambahkan toko mitra yang dapat melayani pembayaran dengan KJB.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Inovasi Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah Melalui Kartu Jogja Berprestasi

Proses inisiasi inovasi penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah melalui Kartu Jogja Berprestasi dimulai dengan langkah *agenda setting*, diikuti dengan langkah penyesuaian. Tahap implementasi inovasi penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah melalui Kartu Jogja Berprestasi diteruskan dari fase re-definisi, diikuti dengan fase klarifikasi, dan terakhir memasuki fase rutinisasi. Setelah melalui kelima tahap inovasi tersebut dari awal sampai akhir tanpa terkecuali maka Kartu Jogja Berprestasi bisa dibilang berhasil.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Penyaluran Jaminan Pendidikan Daerah Melalui Kartu Jogja Berprestasi

Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama, tersedianya SIM JPD, adanya dukungan dari lintas sektor Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang mendukung. Selain itu, faktor penghambat yaitu masyarakat sasaran penerima JPD kurang memiliki keterampilan literasi teknologi informasi, sosialisasi lewat daring dianggap belum efektif, pembatasan

barang yang bisa dibeli dengan KJB, masyarakat lebih senang terima uang tunai dari pada kartu belanja, kurangnya toko mitra di Kota Yogyakarta.

Saran

- a. Menambah toko yang diajak kerjasama akan menjangkau lebih dekat siswa yang menerima bantuan yang ada di Kota Yogyakarta.
- b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan KJB secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta perlu menyediakan banner maupun poster tentang alur pengurusan dan penyaluran JPD di ruang pelayanan dan ditempatkan di tempat yang strategis sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya bantuan JPD.
- d. Regulasi pembelian barang perlu dimodifikasi kembali dengan memperluas cakupan barang yang bisa dibeli namun diberlakukan jumlah maksimal suatu jenis barang yang dapat dibeli dalam jangka waktu tertentu sehingga penggunaan JPD bisa lebih fleksibel namun tetap bisa terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

Ancok, D. (2012). *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Jakarta: Erlangga.

Brown, S.P.O.d.K. (2005). *Managing Change and Innovation Public Service Organization*. New York: Routledge.

Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. (2005). *RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025*.

Yogyakarta: Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Basuki, Y & Kasmad, R. & Nasrulhaq. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik (Inovasi Program Si-Cakep di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan). *Matra Pembaruan*. Volume (2), 207-216.

Danar. (2020). *Kartu Jogja Berprestasi Tekan Putus Sekolah*. Diakses tanggal 3 Desember 2021 dari <https://www.krjogja.com/pendidikan/berita/kartu-jogja-berprestasi-tekan-putus-sekolah/>

Darmawan. (2020). PELUNCURAN KARTU JOGJA BERPRESTASI (KJB). Diakses tanggal 15 Mei 2022 dari <https://dindikpora.jogjakota.go.id/detail/index/14321>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). *Undang-Undang RI No 20, tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. (2021). *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor 188/148 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jaminan Pendidikan Daerah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta*. Yogyakarta. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

Fariani, L., Mappamiring, Kasmad, R. (2020). Innovative Organization Pada Program One Agency One Innovation Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. *Journal Unismuh*. Volume (1) nomor 1, 88 - 99.

- Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulas, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintahan*. Volume (4) nomor 1, 44-55
- Fontana, A. (2011). *Innovate We Can!*. Bekasi: Cipta Inovasi Sejahtera.
- Hutagalung, S. S. & Hermawan D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Irawati, Nofi & Zulkifli, Zulkifli (2021) EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH (JPD) NON TUNAI DI SMP NEGERI 14 YOGYAKARTA TAHUN 2020. *Skripsi thesis*, STIE Widya Wiwaha.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Kurniawati, S., Suryadarma, D., Bima, L., & Yusrina, A. (2019). Education in Indonesia: A White Elephant?. *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges for the Jokowi Era and Beyond*, 266-88.
- Marom, A. (2015). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*. Volume (1) no 1. 45-63.
- Maga Swalayan. (2021). *MAGA SWALAYAN MELAYANI TRANSAKSI MENGGUNAKAN KJB (KARTU JOGJA BERPRESTASI)*. Diakses tanggal 15 Mei 2022 dari https://www.youtube.com/watch?v=alx_Y9mR2DA
- _____. (2021). *BELANJA PERLENGKAPAN SEKOLAH DENGAN KARTU JOGJA BERPRESTASI (KJB) DI MAGA SWALAYAN AJA*. Diakses tanggal 15 Mei 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=mSw2qHnt7PI>
- Mirnasari, R. M. (2013). Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya Bungurasih. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume (1) nomor 1, 71-84.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2013). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2020). *Peraturan Walikota Yogyakarta No. 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah*. Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2021). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah*. Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta
- Prawiro, M. (2018). *Pengertian Inovasi, Tujuan, Manfaat, Ciri-Ciri Inovasi*. Diakses tanggal 12 Oktober 2022 dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-inovasi.html>

- Priebe, J. (2014). Official poverty measurement in Indonesia since 1984: A methodological review. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50 (2), 185-205.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovation Third Edition*. New York: The Free Press.
- Sa'diyah, Y. (2020). *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Tingkat Pendidikan Anak*. Diakses tanggal 12 Oktober 2022 dari <https://bidikutama.com/akademik/opini/pengaruh-kondisi-ekonomi-keluarga-terhadap-tingkat-pendidikan-anak/>
- Sa'ud, U.S. (2020). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Sari, N. N. (2019). *Inovasi Program Kelas Khusus Olahraga oleh Pemerintah Kota Surakarta (Studi Kasus SMP Negeri 1 Kota Surakarta)*. *Skripsi thesis*, Universitas Sebelas Maret.
- Soselisa, H. W. (2005). KONSEP KEBUTUHAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM ANALISIS KEBIJAKAN SOSIAL. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 10 (1).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, T. (2008). *Perilaku Konsumen; Implikasi Pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Y. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN Pres.